

INDONESIA PASCA COP26
**KOLABORASI
MENUJU
PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON**



DAFTAR ISI

INDONESIA DALAM KTT IKLIM DUNIA	04
• COP26, Komitmen Dunia untuk Perubahan Iklim	05
• Peta Jalan Indonesia Mitigasi Perubahan Iklim	06
• Prioritas Pembangunan Rendah Karbon	07
• Sinergi Lintas Sektor Menekan Emisi Karbon	08
<hr/>	
INDONESIA PARU-PARU DUNIA	09
• Hutan Indonesia Harapan Dunia	10
• Komitmen Melindungi Hutan	11
• Strategi Mitigasi Iklim Sektor Hutan & Lahan	12
<hr/>	
KOLABORASI UNTUK PENDANAAN IKLIM	13
• Peran Indonesia Mobilisasi Pendanaan Iklim	14
• Pembiayaan Berkelanjutan untuk Indonesia Hijau	15
• Peta Jalan Pembiayaan Hijau Indonesia	16
<hr/>	
KOLABORASI UNTUK PEMBANGUNAN RENDAH KARBON	17
• Kalibiru, Dari Hutan Gundul Menjadi Pusat Ekowisata	18
• Budidaya Ikan Gabus untuk Kelestarian Gambut	19
• Menjaga Hutan dengan Skema Transfer Fiskal	20
• Review Izin Sawit untuk Melindungi Hutan	21
<hr/>	

PENGANTAR

Hutan Indonesia merupakan tiga besar tutupan hutan terluas di dunia dengan luas mencapai 142 juta hektare (ha) di tahun 2020. Tidak hanya terluas, hutan Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati. Selain itu, sekitar 7,8 juta hutan berada di wilayah adat dan dikelola oleh masyarakat adat. Meski memiliki potensi yang besar, keberadaan hutan Indonesia masih terancam dari deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan.

Oleh sebab itu, Kesepakatan Paris 2015 tentang perubahan iklim memberi mandat kepada setiap negara untuk memangkas emisi karbon. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Salah satu upaya untuk mencapai target ini adalah dengan menerapkan pembangunan rendah karbon.

Inisiatif pembangunan rendah karbon dilakukan pada bidang-bidang prioritas, terutama dalam hal tata guna lahan hutan dan gambut. Sektor hutan dan lahan gambut memberi kontribusi penurunan emisi Indonesia sebesar 17%, melebihi separuh dari target dengan usaha sendiri.

Pembangunan rendah karbon mengutamakan keseimbangan antara upaya pengurangan emisi dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat sipil (CSO), dan warga lokal, sangat penting untuk mendorong suksesnya pembangunan rendah karbon.

Jakarta, Desember 2021
TIM PENYUSUN

INDONESIA DALAM KTT IKLIM DUNIA

Komitmen dunia untuk mencegah perubahan iklim semakin kuat. Termasuk Indonesia yang membentuk kebijakan pengurangan emisi di berbagai sektor. Terbaru, strategi pengendalian iklim global dibahas dalam konferensi COP26 yang menghasilkan berbagai komitmen pimpinan dunia.



COP26, KOMITMEN DUNIA UNTUK PERUBAHAN IKLIM

KTT PBB ke-26 yang diselenggarakan di Glasgow merupakan ajang dunia membahas pengendalian perubahan iklim.

AGENDA UTAMA COP26



Memastikan pencapaian *nett zero* & menjaga batas kenaikan suhu 1,5°C

- Mengurangi deforestasi
- Beralih ke kendaraan listrik
- Menghentikan penggunaan batu bara
- Mendorong investasi energi terbarukan



Beradaptasi menjaga masyarakat & lingkungan

- Memulihkan ekosistem
- Membangun infrastruktur & pertanian yang lebih tangguh



Mobilisasi pembiayaan

- Alokasi **US\$ 100 miliar/tahun** oleh negara maju untuk penanganan iklim
- Optimalisasi lembaga keuangan internasional



Kerja sama penyelesaian *Paris Rulebook*

- Memperkuat kerja sama pemerintah, swasta & masyarakat



AGENDA INDONESIA



Menetapkan **Peta Jalan Adaptasi Perubahan Iklim 2030**



Meningkatkan ambisi **mengurangi emisi karbon di sektor hutan & lahan 2030**



Kolaborasi dalam menyelesaikan **komitmen Perjanjian Paris 2015**



Meminta negara maju berperan lebih besar dalam mencapai **nett zero**

Keterangan:

COP: Conference of the Parties

KTT: Konferensi Tingkat Tinggi

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PETA JALAN INDONESIA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pemerintah menyusun sejumlah strategi untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Target NDC 2030

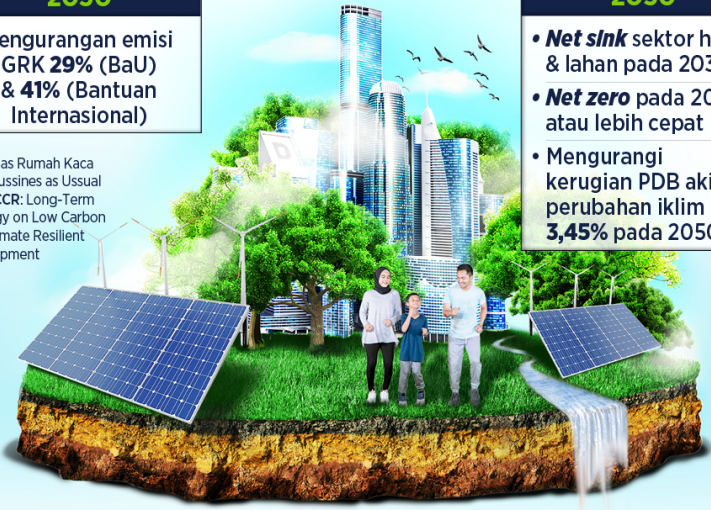
Pengurangan emisi
GRK **29%** (BaU)
& **41%** (Bantuan
Internasional)

GRK: Gas Rumah Kaca
BaU: Business as Usual
LTS-LCCR: Long-Term
Strategy on Low Carbon
and Climate Resilient
Development

AGENDA STRATEGIS

Target LTS-LCCR 2050

- **Net sink** sektor hutan & lahan pada 2030
- **Net zero** pada 2060 atau lebih cepat
- Mengurangi kerugian PDB akibat perubahan iklim **3,45%** pada 2050



STRATEGI MENCAPAI EMISI NOL

Mitigasi

- Menekan deforestasi & degradasi hutan
- Mengelola hutan secara berkelanjutan
- Rehabilitasi hutan & lahan
- Restorasi lahan gambut & mangrove

Adaptasi

- Melindungi kawasan pesisir
- Mengelola daerah aliran sungai terintegrasi
- Membangun infrastruktur & pertanian tahan iklim

PENTINGNYA DUKUNGAN FINANSIAL NEGARA MAJU



Mendukung penerapan ekonomi hijau



Membantu negara berkembang menanggulangi perubahan iklim



Memastikan komitmen setiap negara mencapai target *net-zero* dan *net sink*

SUMBER: BAPPENAS, KLHK, BISNIS INDONESIA, INDONESIA.GO.ID, GENERASI NOL EMISI, TEMPO
ILUSTRASI: DIOLAH DARI 123RF | PENULIS: MAULINA ULFA | DESAIN: DANI NURBIANTORO

PRIORITAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Upaya Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dilakukan pada bidang-bidang prioritas yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

BIDANG PRIORITAS PRK

Program

Energi berkelanjutan

Target 2024

Menuju porsi bauran EBT **23%**



Pemulihan lahan

- Restorasi gambut **330 ribu/ tahun**
- Peningkatan luasan tutupan lahan **420 ribu/tahun**



Pengelolaan limbah

Akumulasi sampah terkelola nasional **339,4 juta ton**

Industri hijau

10% industri menengah-besar tersertifikasi SIH



Pesisir dan laut

Luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai **50 ribu ha**



Keterangan:

Karhutla: Kebakaran hutan dan lahan
GRK: Gas Rumah Kaca
SIH: Standar Industri Hijau

CAPAIAN PENURUNAN EMISI GRK (2018)

Menjadi kontributor terbesar berkat moratorium sawit & hutan, pengendalian karhutla, dan rehabilitasi hutan



Kehutanan, lahan, dan pertanian

Penurunan Emisi GRK (Juta Ton Co2e)

↓ 377



Energi, transportasi, dan industri

↓ 70



Pengelolaan limbah

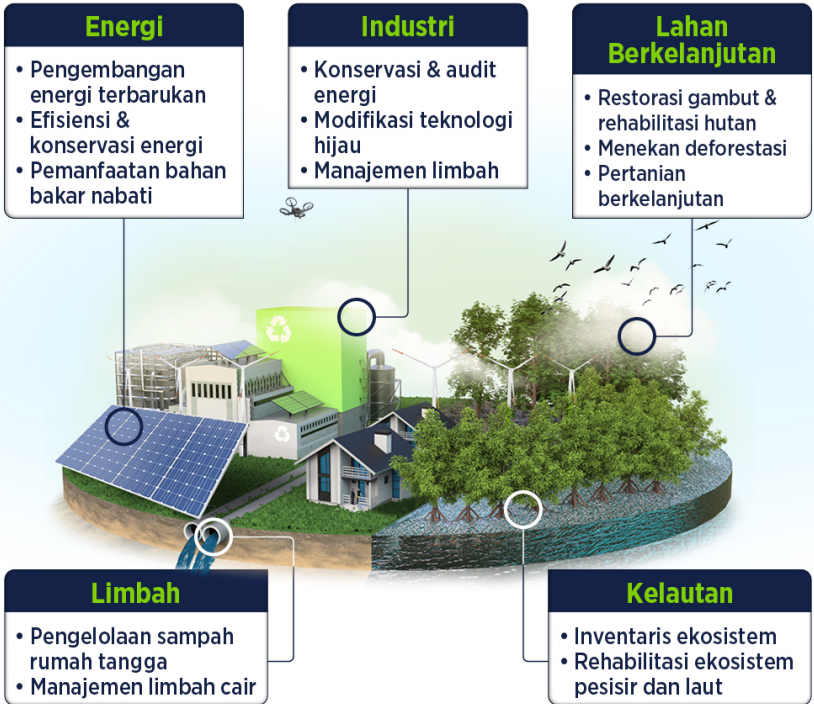
↓ 5

SUMBER: RPJMN 2020-2024, LAPORAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON | ILLUSTRASI: DIOLAH DARI 123RF | PENULIS: ALFONS | DESAIN: BINTANG

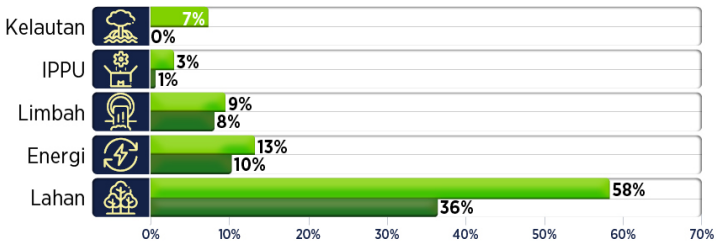
SINERGI LINTAS SEKTOR MENEKAN EMISI KARBON

Terdapat lima sektor penting dalam upaya menekan emisi karbon, masing-masing memiliki strategi khusus.

STRATEGI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON



PENURUNAN EMISI SEKTORAL



IPPU = Industri dan Penggunaan Produk ■ Target 2024 ■ Persentase Penurunan (tahun 2018)

SUMBER: RPJMN 2020-2024, BAPPENAS | ILUSTRASI: TIMOTHY ADRY | PENULIS: ALFONS YOSHIO | DESAIN: DANI NURBIANTORO

INDONESIA PARU-PARU DUNIA

Memiliki hutan tropis dan lahan gambut yang besar, Indonesia merupakan *climate superpower* yang berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim. Kebijakan sektor hutan dan lahan yang dilakukan Indonesia akan turut mempengaruhi pencapaian target iklim dunia.



HUTAN INDONESIA HARAPAN DUNIA

Hutan Indonesia termasuk dalam benteng terakhir dunia dalam mencegah krisis iklim. Namun, sejumlah tantangan kini dihadapi.



KEKAYAAN HUTAN INDONESIA



ANCAMAN HUTAN INDONESIA

115 ribu ha tingkat deforestasi (2020)

1,6 juta ha lahan terdampak karhutla (2019)

708 juta ton CO₂ emisi dari karhutla (2019)

SUMBER: INDONESIA GO ID, KLHK, MONGABAY, BRWA, CAMS | ILLUSTRASI: DIOLAH DARI 123RF | PENULIS: MELATI KRISTINA | DESAIN: VERY ANGGAR

KOMITMEN MELINDUNGI HUTAN

Pasca COP26, Indonesia memiliki berbagai pekerjaan rumah untuk mencapai target penurunan emisi sektor hutan & lahan.



KOMITMEN PERLINDUNGAN HUTAN & LAHAN

Deklarasi lebih dari 100 pemimpin negara pada COP26

Pakta Iklim Glasgow

- Meninjau & memperkuat target iklim NDC 2030
- Menekankan integritas ekosistem, kolaborasi multilevel & keadilan iklim

Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan & Penggunaan Lahan

- Deklarasi menghentikan deforestasi dan degradasi lahan pada 2030
- Transformasi perdesaan yang inklusif

PEKERJAAN RUMAH INDONESIA



Penguatan Kebijakan

- Perlindungan hutan & gambut
- Akselerasi perhutanan sosial & restorasi gambut
- Perlindungan masyarakat adat



Penguatan Pemerintah Daerah

- Kolaborasi multipihak
- Integrasi agenda iklim pada perencanaan pembangunan daerah
- Penguatan koordinasi pemerintah daerah



Pencapaian Net Sink FOLU 2030

- Penyelarasan kebijakan kehutanan dan energi
- Perlindungan sosial & lingkungan pada pembangunan

Keterangan:
 Net Sink FOLU: Penyerapan karbon bersih sektor hutan & lahan
 NDC: Nationally Determined Contribution

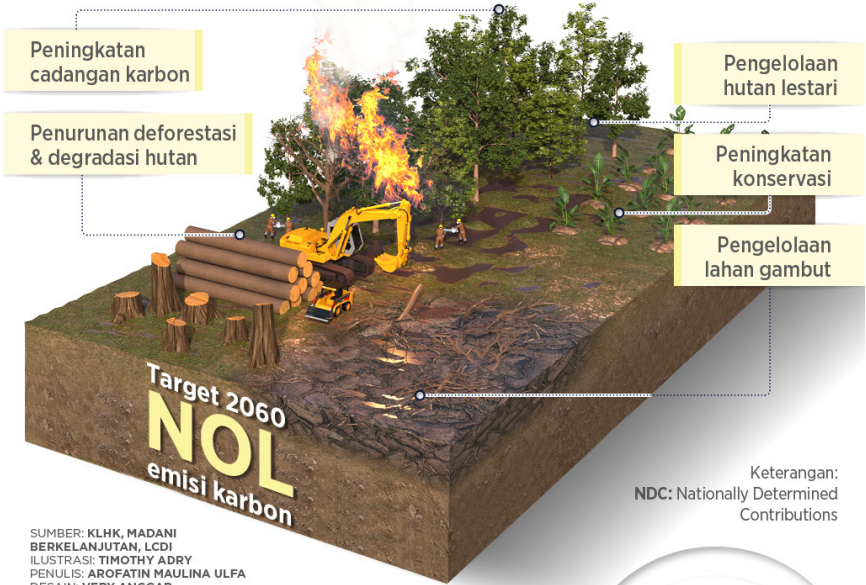
SUMBER: MADANI BERKELANJUTAN
 PENULIS: JEANY HARTRIANI
 ILLUSTRASI: JOSHUA SIRINGO RINGO, FREEPIK
 DESAIN: NUNIK SEPTIYANTI

STRATEGI MITIGASI IKLIM SEKTOR HUTAN & LAHAN

Komitmen mitigasi iklim Indonesia mencakup sektor hutan dan lahan. Untuk mewujudkannya, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

SKENARIO KARBON NETRAL HUTAN & LAHAN

Berdasarkan Roadmap NDC Mitigasi Perubahan Iklim 2021



SUMBER: KLHK, MADANI BERKELANJUTAN, LCDI
ILUSTRASI: TIMOTHY ADRY
PENULIS: AROFATIN MAULINA ULFA
DESAIN: VERY ANGGAR

Keterangan:
NDC: Nationally Determined Contributions



PEKERJAAN RUMAH



Meningkatkan target pengurangan emisi



Meningkatkan target restorasi lahan gambut



Memperbaiki regulasi hutan & lahan



Memperkuat mitigasi perubahan iklim



Sinkronisasi kebijakan pusat & daerah

KOLABORASI UNTUK PENDANAAN IKLIM

Upaya pencegahan risiko perubahan iklim membutuhkan kolaborasi berbagai negara. Di forum dunia, Indonesia aktif mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral dalam pendanaan agenda pencegahan perubahan iklim. Peta jalan pembiayaan berkelanjutan juga dibentuk untuk memperkuat pendanaan berkelanjutan di dalam negeri.



PERAN INDONESIA MOBILISASI PENDANAAN IKLIM

Indonesia berpotensi memperkuat perannya dalam mitigasi perubahan iklim global melalui forum menteri keuangan dunia dan pelaksanaan KTT G20.



TERPILIHNYA MENKEU SRI MULYANI

Sebagai *Co-Chair the Coalition of Finance Minister for Climate Action 2021-2023*

- Mendukung** upaya kolektif dalam:
- Menerapkan kebijakan fiskal
 - Manajemen keuangan publik
 - Mobilisasi pendanaan iklim

TUAN RUMAH KTT G20 2022

Membahas **pertumbuhan ekonomi berkelanjutan & inklusif**, melalui:



Upaya pengendalian perubahan iklim



Pembangunan berwawasan lingkungan

KEBIJAKAN PENGENDALIAN IKLIM INDONESIA



Mengejar target emisi GRK 2030



Menetapkan **4,1%** anggaran iklim di APBN



Membentuk BPD LH



Menerbitkan *Green Sukuk & Retail Green Sukuk*

Keterangan: **KTT**: Konferensi Tingkat Tinggi | **BPD LH**: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup | **APBN**: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | **GRK**: Gas Rumah Kaca

SUMBER: KEMENKEU, KLHK, KATADATA | ILLUSTRASI: DIOLAH DARI 123RF | PENULIS: HANNA FARAH VANIA | DESAIN: VERY ANGGAR

PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN UNTUK INDONESIA HIJAU

Sustainable finance atau pembiayaan berkelanjutan mendukung upaya pembangunan ekonomi yang selaras dengan lingkungan.

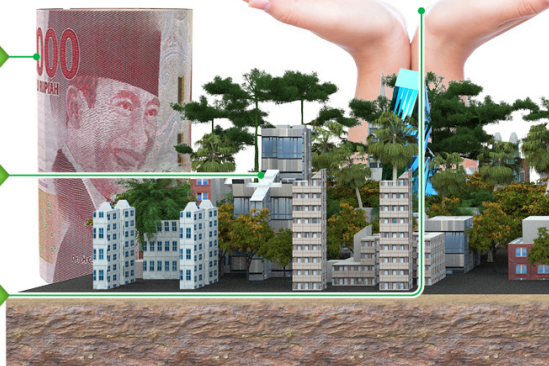


MENGENAL PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN

Dukungan jasa keuangan untuk ekonomi berkelanjutan

Menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Menjalankan prinsip *profit, people, planet*



UPAYA INDONESIA



Roadmap Keuangan Berkelanjutan **2021-2025**



Membentuk IKBI yang terdiri atas **15 bank**



Mengembangkan **taksonomi hijau**, basis investasi berkelanjutan



Realisasi kredit hijau perbankan sebesar **Rp 882 triliun**

POTENSI



Rp 67,8 ribu triliun kebutuhan pendanaan hingga 2030



Minat investor pada produk hijau **naik 20%** (2021)



Permintaan produk & jasa ramah lingkungan **meningkat**

Keterangan: **IKBI** (Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia)

PETA JALAN PEMBIAYAAN HIJAU INDONESIA

Pemerintah Indonesia menyusun peta jalan pembiayaan berbasis lingkungan untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

SUMBER: KEMENKEU,
KATADATA, KONTAN,
KEMENKO EKONOMI, KLHK
ILUSTRASI: JOSHUA
SIRINGO RINGO
PENULIS: MAULINA ULFA
DESAIN: NUNIK SEPTIYANTI

STRATEGI

Menyusun Peta Jalan
Pembiayaan Berkelanjutan 2021

Kolaborasi multi-pihak mendanai energi
terbarukan & mitigasi perubahan iklim

Membentuk Badan Pengelolaan Dana
Lingkungan Hidup (BPD LH)



PERAN BPD LH

Tugas Utama

- Mengkoordinir pendanaan lingkungan hidup
- Menyalurkan subsidi, hibah, jaminan & pinjaman

Keterangan:
APBN: Anggaran
Pendapatan Belanja Negara
UMKM: Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

Sumber Dana

- APBN
- Swasta
- Dukungan bilateral
- Lembaga internasional
- Filantropi

AGENDA BPD LH

Menerima &
mengelola
dana lembaga
internasional

Menciptakan
pembiayaan
berbasis sumber
daya alam

Mengelola
dana usaha
kehutanan

KOLABORASI UNTUK PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Indonesia berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon. Salah satu upaya mewujudkannya adalah dengan menerapkan pembangunan rendah karbon. Inisiatif pembangunan rendah karbon dilakukan pada bidang-bidang prioritas, terutama dalam hal tata guna lahan hutan dan gambut. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat sipil (CSO), dan warga lokal, sangat penting untuk mendorong suksesnya pembangunan rendah karbon.



KALIBIRU, DARI HUTAN GUNDUL MENJADI PUSAT EKOWISATA

Kalibiru menjadi contoh sukses kolaborasi pemerintah & masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis perhutanan sosial.

MENGENAL KALIBIRU



Beroperasi sejak **2009**



Mempekerjakan **116 orang** (2018)



Dikelola oleh Kelompok **Tani HKm Mandiri**



Berlokasi di **Hutan Menoreh, Kulon Progo, DI Yogyakarta**



Sebelumnya **terbengkalai** akibat pembalakan liar



BENTUK KOLABORASI



Pemerintah & LSM → memetakan wilayah potensi wisata



LSM Damar Sapto Tanjung & Peneliti → menjembatani pembentukan payung hukum HKm

MANFAAT BAGI SEKITAR

Membuka lapangan kerja & mengurangi urbanisasi

Mempertahankan habitat satwa, khususnya burung

Mendukung pembangunan infrastruktur

Memberi bantuan dana untuk dusun

Capaian

- Meraih penghargaan **Wana Lestari** (2014)
- Pengunjung melonjak **82%** (2014-2016)
- Omzet mencapai **Rp 7,2 miliar** (2018)
- Penghasilan HKm Mandiri mencapai **Rp 600 juta/bulan**

Keterangan: **LSM** (Lembaga Swadaya Masyarakat), **HKm** (Hutan Kemasyarakatan)

SUMBER: KATADATA, MONGABAY, LIPUTANG | FOTO: 123RF | PENULIS: HANNA FARAH VANIA | DESAIN: VERY ANGGAR

BUDIDAYA IKAN GABUS UNTUK KELESTARIAN GAMBUT

Budidaya ikan gabus di Siak, Riau, berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga lahan gambut.

MENGENAL BUDIDAYA GABUS DI SIAK



BENTUK KOLABORASI

PemDes	PemKab	Dinas Perikanan Kabupaten	LTKL	PT Alam Siak Lestari
<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan kelompok budidaya b. Pendanaan operasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyaluran dana melalui skema TAKE b. Pembentukan payung hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan & pelatihan b. Penetapan gabus jadi produk unggulan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merancang bisnis berkelanjutan b. Memberikan bimbingan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendirikan laboratorium ekstraksi albumin b. Mengelola bisnis

MANFAAT

- Menjaga gambut & mencegah karhutla
- Penghasilan **2x lipat** dibanding sawit
- Memberikan nilai tambah **56%**
- Menjadi bahan baku industri kesehatan, pangan, kecantikan

Keterangan:

LTKL: Lingkaran Temu Kabupaten Lestari

TAKE: Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi

SUMBER: LTKL | ILLUSTRASI: TIMOTHY ADRY | PENULIS: FITRIA NURHAYATI | DESAIN: VERY ANGGAR

MENJAGA HUTAN DENGAN SKEMA TRANSFER FISKAL

Transfer fiskal berbasis ekologis di Papua berdampak positif pada pelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

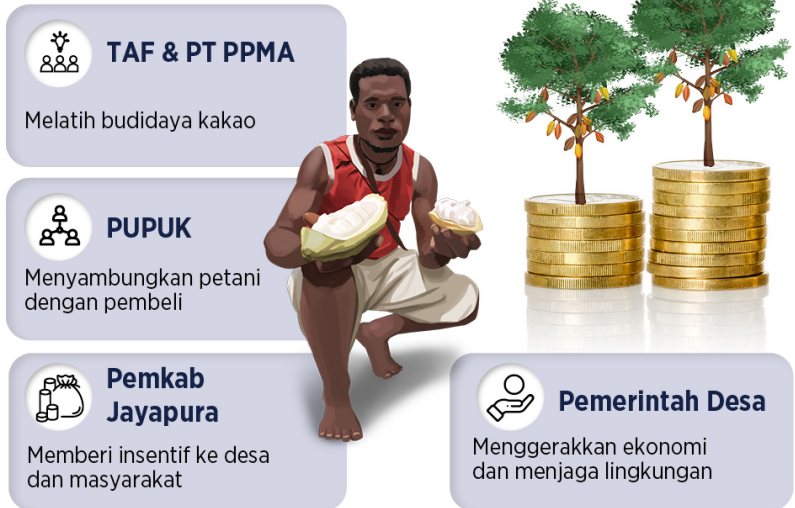
SKEMA BERJENJANG

Diberikan berdasarkan kinerja pengelolaan hutan dan lingkungan



*) belum diterapkan

KOLABORASI MULTI-PIHAK



MANFAAT TRANSFER FISKAL DI PAPUA



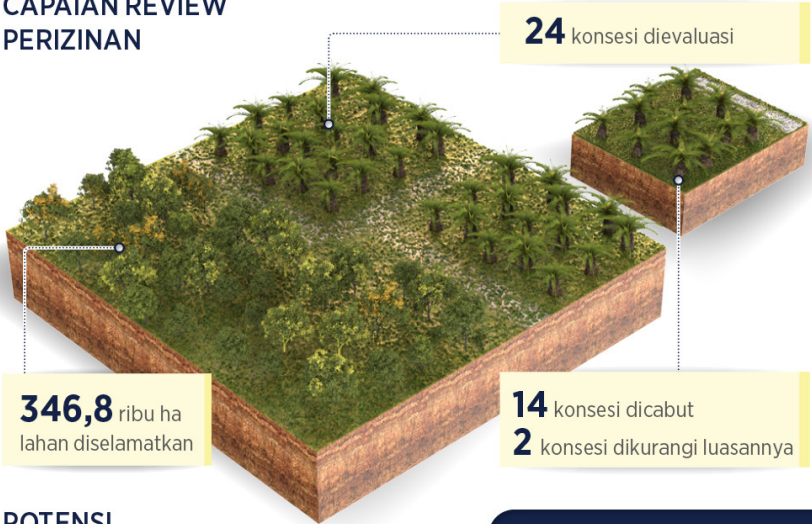
Keterangan: TAF: The Asia Foundation
 PUPUK: Perusahaan Inkubator Perkumpulan Usaha Kecil
 PT PPMA: Perkumpulan Terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

SUMBER: THE ASIA FOUNDATION, KATADATA INSIGHT CENTER |
 ILLUSTRASI: JOSHUA DAN 123RF |
 PENULIS: MELATI | DESAIN: BINTANG


REVIEW IZIN SAWIT UNTUK MELINDUNGI HUTAN


Belasan konsesi dicabut sebagai hasil review izin perkebunan sawit di Papua Barat. Lahan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat.


CAPAIAN REVIEW PERIZINAN



POTENSI EKONOMI BERKELANJUTAN

- 

Masyarakat adat mengelola SDA berbasis kearifan lokal
- 

Memanfaatkan hutan dengan tetap melestarikan alam
- 

Menggunakan skema Perhutanan Sosial, hutan adat, dan pengakuan tanah ulayat

Keterangan:
HGU: Hak Guna Usaha

SUMBER: ECONUSA | ILUSTRASI: TIMOTHY ADRY
PENULIS: FITRIA NURHAYATI | DESAIN: NUNIK SEPTIYANTI

BASIS EVALUASI

Dasar Hukum

1. Inpres 8/2018 tentang Moratorium Sawit
2. Deklarasi Manokwari
3. Gerakan Nasional Penyelamatan SDA

Kategori Pelanggaran

1. Administrasi
Terkait izin usaha, izin pemanfaatan kayu, HGU
2. Operasional
Terkait persoalan kebun inti plasma, lahan gambut, kawasan hutan



**INDONESIA PASCA COP26
KOLABORASI MENUJU
PEMBANGUNAN RENDAH KARBON**

Editor:

Heri Susanto, Padjar Iswara,
Jeany Hartriani

Penulis:

Alfons Yoshio Hartanto, Arofatin Maulina Ulfa,
Fitria Nurhayati, Hanna Farah Vania,
Melati Kristina Andriarsi

Desain:

Muhamad Yana, Cicilia Sri Bintang Lestari,
Dani Nurbiantoro, Nunik Septiyanti,
Very Anggar Kusuma, Wahyu Risyanto

Ilustrasi:

Joshua Siringo Ringo, Timothy Adry Emanuel

Mitra Pendukung Data & Informasi:

Didukung oleh:

KATADATAcoid

Katadata Indonesia

katadatacoid

www.katadata.co.id